**Demam Paylater Ancam Kehilangan Subsidi**

JAKARTA – Pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *paylater* yang terus melaju dapat menimbulkan ancaman baru bagi nasabah. Ketika pengembalian pinjamannya bermasalah, mereka berpotensi kehilangan jatah subsidi yang sudah disediakan pemerintah.

“Kondisi ini sering kali tidak disadari oleh masyarakat. Akibat nikmat *paylater* yang sesaat bahkan sedikit, bisa kehilangan manfaat yang jauh lebih besar,” ujar Christiantoko, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Kerisauan yang disampaikan Christiantoko itu, mengingat kenaikan *outstanding paylater* yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai 47,11% secara tahunan (*year on year*, yoy) pada April 2025, hingga menjadi Rp8,24 triliun.

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seiring dengan tingginya laju penyaluran pinjaman tersebut, risiko kreditnya juga ikut naik. Rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*, NPF) *gross* BNPL pada April 2025 mencapai 3,78%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang 3,48%.

Menurut Christiantoko, kenaikan kredit bermasalah itu menunjukkan kemampuan bayar masyarakat yang melemah. “Dampak lanjutannya bisa lebih buruk,” tegasnya.

Dampak lanjutan yang dimaksud bermacam-macam, salah satunya adalah terhambatnya akses masyarakat untuk memperoleh kredit pemilikan rumah atau KPR. Alasannya, di saat status pinjaman nasabah dari *paylater* memburuk, akan terekam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan ([SLIK](https://www.bisnis.com/topic/53302/slik)) OJK, yakni sistem yang mencatat riwayat kredit nasabah. Demikian juga dengan kesempatan untuk mendapakan kredit-kredit lain yang jauh lebih menguntungkan ke depannya.

Dengan demikian, apabila skor kredit debitur dalam SLIK masuk kategori 5 atau macet, berarti akan sulit meminjam dana dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di sinilah, Christiantoko menegaskan, masyarakat akan sulit mendapatkan kredit, termasuk pinjaman yang mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah, seperti KPR.

Seperti diungkapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, alokasi anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp18,8 triliun. Dana itu akan disalurkan untuk 220 ribu unit rumah.

“Masyarakat yang punya masalah pada kredit *paylater* tidak akan bisa menikmati dana subsidi itu, hanya gara-gara kenikmatan sesaat dari *paylater*,” ungkap Christiantoko.

Padahal, kredit pemilikan rumah melalui FLPP itu, lanjutnya, sangat meringankan. Suku bunganya, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, hanya 5% sepanjang masa kredit. Sisa dari yang seharusnya, misalnya suku bunga semestinya adalah 12,5%, itu artinya yang 7,5% ditanggung oleh pemerintah. FLPP hanya satu dari beragam program subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Karena itu, Chriatiantoko menegaskan, masyarakat harus mengerti, jangan sampai manfaat yang besar itu lenyap gara-gara nafsu sesaat dengan *paylater* sampai tak mampu bayar. Akhirnya, subsidi yang telah disediakan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan.

“Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak buruk dari candu *paylater* ini juga penting dilakukan oleh OJK dan pemerintah agar masyarakat paham potensi kehilangan manfaat yang besar dari subsidi,” ungkapnya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NEXT Indonesia Center**

NEXT Indonesia Center adalah lembaga independen dengan konsentrasi di bidang riset dan publikasi. Kami menggabungkan disiplin jurnalistik sebagai penyajian dan disiplin akademik sebagai panduan dalam melakukan riset.

Konsentrasi kegiatan riset dan publikasi kami, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Kami membantu para pemangku kepentingan agar lebih tepat dalam mengambil kebijakan strategis, baik untuk organisasi pemerintah, korporasi, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga lain dan individu.

**Narahubung:**

Research Coordinator Next Indonesia Center, Dera Endah

Phone: +62 823-1016-5120